

## Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin Minta Hak Tukin Segera Dibayar Pemerintah



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/lakukan-aksi-di-kampus-para-dosen-poliban-minta-hak-tukin-segera-dibayar-pemerintah>

Meski sudah ada peraturan berupa undang undang, namun hak para dosen Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) berupa Tunjangan Kinerja (Tukin) tak juga diterima. Tukin seharusnya diterima dosen di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ini sejak tahun 2020.

Sebab tak ada kejelasan, kondisi ini memicu keresahan dan kekecewaan mendalam di kalangan tenaga pendidik, mereka pun menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk segera membayarkan yang menjadi hak mereka dalam aksi yang berlangsung di kampus Poliban Banjarmasin, Senin (13/1).

Para dosen menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran Tukin telah berdampak pada kesejahteraan mereka, terutama di tengah tuntutan profesionalisme dan kualitas pendidikan vokasi yang semakin tinggi.

Kondisi ini juga menjadi perhatian para pimpinan Poliban Banjarmasin. Mereka mendukung aspirasi para dosen dan berharap pemerintah dapat segera merespons dengan langkah konkret. "Kami selalu mendorong dosen untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka. Namun, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang sama agar keseimbangan hak dan kewajiban ini dapat terwujud," ujar Joni Riadi, Direktur Poliban.

Masalah pembayaran Tukin bagi dosen Kemendiktisaintek bermula sejak 2014, ketika Tukin diamanatkan dalam UU No5 tahun 2014 pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara. Ironisnya, hak ini tidak pernah dirasakan oleh dosen ASN Kemendiktisaintek di seluruh Indonesia, baik sebelum maupun setelah UU ASN diundangkan. Sementara itu, dosen ASN di kementerian-kementerian lain telah menerima Tukin sejak 2012.

Permendikbud No49 Tahun 2020 secara teknis sebenarnya telah mengatur pelaksanaan pembayaran Tukin bagi dosen ASN Kemendiktisaintek. Namun sayangnya, hingga kini, regulasi tersebut belum juga dijalankan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis seusai aksi, para dosen Poliban menuntut pemerintah untuk segera membayarkan Tukin yang tertunggak sejak 2020 tanpa pengurangan atau penundaan lebih lanjut. “Kami berharap pemerintah segera bertindak dan memberikan keadilan bagi para dosen yang selama ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Kemendiktisaintek,” tegas Yusuf Rizal Fauzi, Kordinator Wilayah Kalimantan

Para dosen juga menyoroti bahwa pemberian Tukin secara adil akan meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Masih belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemendiktisaintek terkait tuntutan para dosen Poliban. Namun, para dosen berharap bahwa aspirasi mereka akan segera ditindaklanjuti, mengingat pentingnya peran dosen dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dosen dengan segera menyelesaikan keterlambatan pencairan tukin yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujar salah seorang dosen senior.

Dengan situasi ini, para dosen menegaskan bahwa aksi lanjutan dapat saja dilakukan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam menghargai kerja keras tenaga pendidik demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/lakukan-aksi-di-kampus-para-dosen-poliban-minta-hak-tukin-segera-dibayar-pemerintah>, 15 Januari 2025.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/448138/dosen-poliban-desak-pemerintah-lunasi-tunjangan-kinerja>, 15 Januari 2025.

#### **Catatan Berita**

**Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.**

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

#### Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Rincian Program Pembangunan

##### Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut

masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

#### Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan

kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

## Struktur APBD

